



Kecelakaan di Jalan Raya Ngawi-Mantingan KM 9 Desa Ngale, Kecamatan Paron mengakibatkan satu orang tewas serta dua rumah hancur.

Truk Semen Tabrak Motor dan Rumah, 1 Tewas

Ngawi, Memorandum

Truk trailer muat 32 ton semen mengalami kecelakaan dengan motor hingga menabrak dua rumah.

Kejadian tersebut di Jalan Raya Ngawi-Solo tepatnya di Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi sekitar pukul 05.30, Rabu, (12/8).

Akibat kejadian tersebut satu orang dilaporkan tewas di lokasi. Kanit Gakkum Satlantas Polres Ngawi Ipda Agus Harianto mengatakan, kejadian tersebut bermula saat sebuah truk bermuatan semen nopol K 8819 OF melaju dari arah timur menuju barat dan pengendara berboncengan motor jenis Yamaha Vega melaju dari arah barat menuju ke timur.

“Mendengar keterangan saksi, pengendara motor mengambil haluan terlalu ke kanan sehingga bertabrakan dengan truk terkendali hingga menghantam dua rumah warga,” katanya.

Satu orang (pengendara

motor) tewas di lokasi kejadian atas nama Maryanto (47), warga Desa Baki Pandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD dr. Soeroto Ngawi untuk dilakukan visum, sementara korban yang dibonceng Andriyan Eka Buana (24), warga Desa Baki Pandeyan, mengalami luka dan dilarikan ke RS Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis.

Agus menyampaikan, kecelakaan tersebut mengakibatkan 1 motor milik korban ringsek parah dan dua rumah milik Ma’ruf Hasani (29), dan Anwar (60) yang berlokasi ditempat kejadian tepatnya Desa Ngale, Kecamatan Paron, Ngawi rusak.

“Untuk seluruh korban sudah di evakuasi. Kasus kecelakaan ini ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut,” tandasnya. (ris/dik/nov)



Rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan KUA-PPAS digelar di gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (12/8).

DPRD Kota Madiun Bedah RKA OPD di PAK 2026

Madiun, Memorandum

Program prioritas yang belum tercapai bakal disempurnakan.

Melalui Perubahan APBD (PAK) Kota Madiun 2026, Pemkot mendapat amunisi tambahan pendapatan sekitar Rp 14 miliar. Kendati begitu, DPRD memastikan setiap pengajuan anggaran OPD bakal dibedah sebelum program di eksekusi.

Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, sejumlah usulan perubahan anggaran telah dipaparkan TAPD. Fokusnya menyempurnakan program prioritas yang belum memenuhi target tahun ini.

“Prioritas program kegiatan yang kemarin belum tercapai tentunya akan dimasukkan dalam perubahan. Ini untuk mem-back up program yang belum tercapai dan disempurnakan di PAK,” katanya usai memimpin Rapat Paripurna penandatanganan nota kesepakatan atas perubahan KUA-PPAS, Rabu (12/8).

Menurut Armaya, DPRD bakal membedakan rencana kerja dan anggaran (RKA) masing-masing OPD. Tujuannya memastikan belanja perubahan benar-benar menepati sasaran program prioritas. “Mekanisme ini harus dilalui agar semua

target RPJMD dan RKPD bisa diselesaikan pada 2026,” jelasnya.

Hingga Agustus ini, Armaya menyebut mayoritas target program telah tercapai. Persentase yang masih tertinggal diklaim tidak banyak. Kendati demikian, DPRD meminta kekurangan tersebut dikejar hingga akhir tahun.

“Ini yang kami push agar target-target bisa terselesaikan pada 2026. RKA OPD harus di-support agar tidak melenceng dari target yang telah ditentukan,” tegasnya.

Armaya belum memerinci kegiatan yang bakal mendapat prioritas tambahan anggaran. Pemetaan dilakukan saat pembahasan RKA. Termasuk program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ekonomi inklusif.

“Kami bedah mana kegiatan yang sudah tercapai dan belum. Kemudian prioritasnya apa agar tidak melenceng dari target RPJMD,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun mengatakan empat prioritas pembangunan tetap menjadi fokus. Yakni penguatan ekonomi, peningkatan SDM, tata kelola pemerintahan, serta harmonisasi budaya dan inovasi daerah.

Evaluasi pelaksanaan program selama sekitar tujuh bulan terakhir, menurut Bagus, menjadi pijakan untuk mempertajam arah pembangunan. Sejumlah program bakal di-upgrade mulai tahun ini sebagai fondasi transformasi pada 2027.

“Visi-misi, target, dan program-program yang ada hari ini ingin mulai kami upgrade. Tahun 2026 membangun fondasinya sehingga pada 2027 transformasi program sudah siap dijalankan,” terangnya.

Di sisi pendapatan, Bagus menyebut terdapat kenaikan sekitar Rp 14 miliar. Tambahan tersebut antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sekitar Rp 10 miliar di antaranya berasal dari pajak daerah.

Namun, perubahan kegiatan belum otomatis berjalan. Pemkot masih harus menyusun RKA sebelum dibahas bersama legislatif.

“Selanjutnya kami bikin RKA, kemudian dibahas dengan DPRD. Perubahan kegiatan ini nanti dikawal sekaligus mendapat masukan dan saran dari teman-teman DPRD,” tandas Bagus. (adv/ggi/nov)

Komisi B DPRD Madiun Kritisi Kinerja Dinkes Atas Lambannya Penurunan Jumlah Stunting

Madiun, Memorandum

DPRD Kabupaten Madiun menyoroti lambatnya penurunan angka stunting di Kabupaten Madiun.

Komisi B DPRD Kabupaten Madiun menilai kinerja Dinas Kesehatan patut dipertanyakan.

Data dihimpun, prevalensi stunting hingga Juli 2026 baru turun 0,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, alias dari 5,14 persen menjadi 5,02 persen.

Sedangkan angka 5,14 persen di tahun 2025 tersebut mengalami penurunan 0,34 persen dari tahun 2024.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun, Wahyu mengakui penurunan tersebut menunjukkan adanya progres positif, tetapi belum cukup maksimal jika berkaca secara historis.

Padahal, pemerintah daerah telah menjalankan berbagai program intervensi melalui sektor kesehatan dan Posyandu.

“Penurunan memang 0,12 memang belum maksimal, makanya perlu adanya upaya intervensi yang



Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Wahyu

sudah dilakukan perlu ditingkatkan lagi,” ujarnya, Rabu (12/8).

Menurut Wahyu, pencegahan stunting tidak bisa hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Intervensi harus dilakukan secara berkelanjutan sejak sebelum pernikahan hingga masa tumbuh kembang anak.

Politisi PKB itu juga menyoroti peran Posyandu dalam mendukung akurasi data stunting. Ia meminta hasil penimbangan dan pengukuran balita

harus benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan agar pemerintah dapat menentukan kebijakan berdasarkan data yang valid.

“Termasuk peranan Posyandu harus benar-benar memberikan data yang akurat sehingga bisa terpantau secara optimal dan datanya bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya,” katanya.

Di sisi lain, Wahyu mengingatkan upaya percepatan penurunan stunting bakal berdampak secara langsung terhadap fiskal daerah. Jika berhasil mengurai masalah di tengah efisiensi maka daerah akan menerima reward dari pemerintah pusat. Namun, kalau gagal bisa berpotensi memperkecil ruang daerah dalam mendapatkan dana transfer yang besar.

“Di tengah-tengah gencarnya penurunan dana transfer daerah termasuk Kabupaten Madiun, tapi apa pun itu tetap kita berupaya untuk bisa menjalankan program-program yang sudah kita rencanakan semaksimal mungkin,” pungkasnya. (aji/nov)

Komisi II DPRD Ngawi Sidak Wilayah Terdampak Kekeringan

Ngawi, Memorandum

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi melakukan sidak di beberapa lokasi wilayah terdampak kekeringan.

Antara lain di Dusun Ngilon, Desa Bangunrejo Lor dan Dusun Ngrowo, Desa Papungan, Kecamatan Pitu. “Kami ingin melihat secara langsung kondisi di lapangan,” kata Amin Sunarto, Ketua Komisi II DPRD Ngawi, Rabu (12/8).

Amin mengatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan penanganan dampak kekeringan di wilayah Ngawi.

“Ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam penanganan warga yang terdampak,” terangnya.

Dijelaskan, BPBD Ngawi telah melakukan dropping air ke wilayah yang terdampak kekeringan. Selain itu, masyarakat diminta ada tambahan tandon air agar dapat menampung air bersih ketika pihak BPBD dropping air bersih.

Pun, pihaknya mengimbau pe-



Anggota Komisi II DPRD sidak wilayah Kekeringan di Desa Bangunrejo Lor, Kecamatan Pitu.

merintah daerah terus menggalakan penamaan pohon agar ketika hujan dapat menyerap air.

“Kami berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan perhatian ketika musim kemarau datang, tetapi juga memperoleh solusi jangka panjang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala pelaksana BPBD Ngawi Prila Yuda Putra me-

nyampaikan, apa yang menjadi saran dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui anggota Komisi II DPRD untuk tambahan tandon air akan segera ditindaklanjuti.

Sekaligus saran untuk melakukan penanaman pohon di wilayah Kabupaten Ngawi. “Kami segera tindak lanjuti rekomendasi komisi II DPRD,” tandasnya. (adv/ris/dik/nov)

MADIUN-NGAWI